

Judul : Penentang Pres-T 20%-25%: Arena berikutnya adalah MK  
Tanggal : Sabtu, 29 Juli 2017  
Surat Kabar : Suara Pembaruan  
Halaman : 2

## Penentang Pres-T 20%-25%: Arena Berikutnya Adalah MK



SP/JOANITO DE SAOJOAO

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) sebelum mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7) malam.

[JAKARTA] UU Penyelenggaraan Pemilu yang antara lain mengatur syarat ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* (Pres-T) 20%-25% sudah disahkan melalui mekanisme demokratis di DPR. Semua pihak harus menghormatinya, termasuk mereka yang tidak setuju terhadap besaran Pres-T. Arena berikutnya bagi penentang pasal Pres-T adalah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui *judicial review*.

Hal itu disampaikan oleh Wasekjen DPP PAN, Yandri Susanto terkait pernyataan pengesahan UU Penyelenggaraan Pemilu. "Karena sudah diundangkan, arena berikutnya ya di MK. Maka pihak yang tak sepakat dengan UU bisa mendorong *judicial review*. Siapa pun yang merasa tak sesuai UUD, serahkan ke MK. Apa pun hasil MK nanti, kita terima," kata Yandri.

PAN, kata Yandri, tak pernah mempermasalahkan soal fair atau tidaknya angka 20% dan atau 25%. Namun,

PAN berpandangan bahwa basis angka Pres-T yang hendak dipakai tak boleh begitu saja merujuk hasil Pemilu 2014, sebab hasil itu sudah dipakai di Pilpres 2014. "Bagi kami konfigurasi politik sudah berubah dan hasil Pemilu 2014 tak lagi boleh dipakai sebagai dasar untuk Pilpres 2019," katanya.

Terkait parpol baru peserta pemilu, kata Yandri, setiap peserta pemilu seharusnya dibolehkan mengusung capres. "Dengan aturan sekarang, mereka tak bisa mengusung. Ada yang dirugikan. Tapi sudahlah, ini sudah selesai. Silakan di MK bersidang, sekarang ranahnya di sana," kata dia.

Sementara Partai Demokrat dipastikan bakal mengajukan uji materi RUU Pemilu ke MK. Pendaftaran uji materi dilakukan bukan atas nama partai melainkan kader-kader Demokrat, setelah RUU Pemilu resmi menjadi undang-undang (UU) atau mendapat nomor. "Ini adalah sesuatu yang harus kami lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bisa orang per

orang (pemohon), paling tidak dari kami, kami punya kader," kata Sekjen Demokrat Hinca IP Pandjaitan, Sabtu (29/7).

Pihaknya bakal menghormati hasil uji materi, termasuk apabila MK menolak.

Wakil Ketum Demokrat Syarif Hasan mengatakan, Gerindra juga bakal melakukan uji materi. "Itu kesepakatan dari kami," kata Syarif.

### Menyayangkan

Partai Golkar menyayangkan pernyataan Ketua Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang kembali menyinggung Pres-T dari aspek konstitusional. Seharus masalah itu tidak perlu disinggung lagi karena sudah diputuskan di paripurna DPR. Jika tidak puas maka tinggal mengajukan gugatan ke MK.

"Kekalahan politik di DPR seharusnya diterima dengan lapang dada dan tidak perlu disinggung-singgung



sebagai bentuk tipu-tipu rakyat. Pak SBY kan mantan presiden dua periode yang waktu itu dipilih dengan adanya ambang batas presiden. Juga dengan Pak Prabowo pernah mencalonkan diri sebagai presiden dan wapres dengan persyaratan ambang batas,” kata Wakil Sekjen PG Aceh Hasan Syadzily di Jakarta, Sabtu (29/7).

Ia menjelaskan keputusan politik memang kadang belum tentu dapat memuaskan semua pihak. Seharusnya keduanya sebagai tokoh bangsa harus menunjukkan sikap kenegarawanan. Jangan karena kalah dalam *voting* lalu menganggap hasilnya tidak sesuai keinginan rakyat.

“Terimalah hasil keputusan UU

Pemilu tersebut dan jika tidak puas ya biarkan masyarakat mengajukan *judicial review* ke MK. Itu biasa terjadi,” ujar anggota Komisi II DPR ini.

Menurutnya, yang harus dilakukan para elit politik bangsa saat ini adalah bagaimana menindaklanjuti UU politik ini untuk diterjemahkan ke dalam Pileg dan Pilpres yang berkualitas. Misalnya, jika dimungkinkan dari sekarang mencari format koalisi yang dapat memperkuat sistem presidensial. Atau melakukan rekrutmen calon anggota legislatif lebih baik.

“Jangan cengeng. Jadi tokoh politik harus dewasa. Sebuah keputusan politik harus diterima dengan lapang dada,” tutupnya. [MJS/YUS/C-6/R-14]